



RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2021-2026



Jl. Prof. Dr. Sudiatmo
KAWASAN PEMERINTAHAN BUKIT PELANGI SANGATTA
Telp. 0549 – 22851 Fax. 0549 – 23115





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas bimbingan dan rahmat-Nya, sehingga proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026, dapat terselesaikan dengan baik, di karenakan Renstra dimaksud merupakan instrument bentuk tanggung jawab SKPD kedepan sesuai Komitmen Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 5 (lima) tahun 2021 - 2026, dengan harapan dan target agar roda pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renstra disusun sebagai dokumen perencanaan kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kutai Timur dan bersifat indikatif.

Menyadari hal tersebut, penyusunan Renstra Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 dan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010, penyusunan telah diupayakan semaksimal mungkin dan mengakomodir semua permasalahan yang ada sekarang maupun yang akan datang, sehingga Renstra Dinas Perhubungan, Tahun 2021 – 2026 ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang terarah dengan target – target yang terukur.

Kepada Tim Penyusun dan seluruh Pemangku Kepentingan yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih, dan semoga Dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026 ini dapat dimanfaatkan dalam pedomanan pelaksanaan perencanaan pembangunan setiap tahun berjalan.

Sangatta, September 2021

Kepala Dinas,

RIZALI HADI, S.IP

NIP. 19690117 199003 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.3.1. Maksud Penyusunan	I-4
1.3.2. Tujuan Penyusunan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1. Tugas Pokok	II-1
2.1.2. Fungsi	II-1
2.1.3. Struktur Organisasi	II-11
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	II-12
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II-12
2.1.2. Sarana Prasarana	II-14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	II-17
2.4. Tantangan dan Peluang Pembangunan Dinas Perhubungan	II-21
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	III-1

3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	III-1
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-5
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Periode 2015-2019	III-10
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-11
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-19
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Penengah Dinas Perhubungan	IV-1
4.2.1.	Tujuan	IV-1
4.2.2.	Sasaran	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1	Strategi	V-1
5.2	Arah Kebijakan	V-3
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
6.1.	Sumber Dana APBD	VI-1
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat/Golongan II-12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan II-13
Tabel 2.3	Jumlah TK2D berdasarkan Pendidikan II-13
Tabel 2.4	Jumlah Esselon II-13
Tabel 2.5	Yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Penjurusan II-14
Tabel 2.6	Jumlah Kendaraan Bermotor II-14
Tabel 2.7	Jumlah Bangunan/Gedung Kantor II-15
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur II-18
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur II-20
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur III-2
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah III-9
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan V-4
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur VI-15
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai salah satu penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari suatu wilayah ke wilayah lain.

Transportasi juga berperan sebagai salah satu penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah yang sangat berpotensi namun belum berkembang.

Perkembangan transportasi yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur – unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya, peraturan – peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna dan hasil guna.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, di samping harus ditata dengan moda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam suatu kesatuan

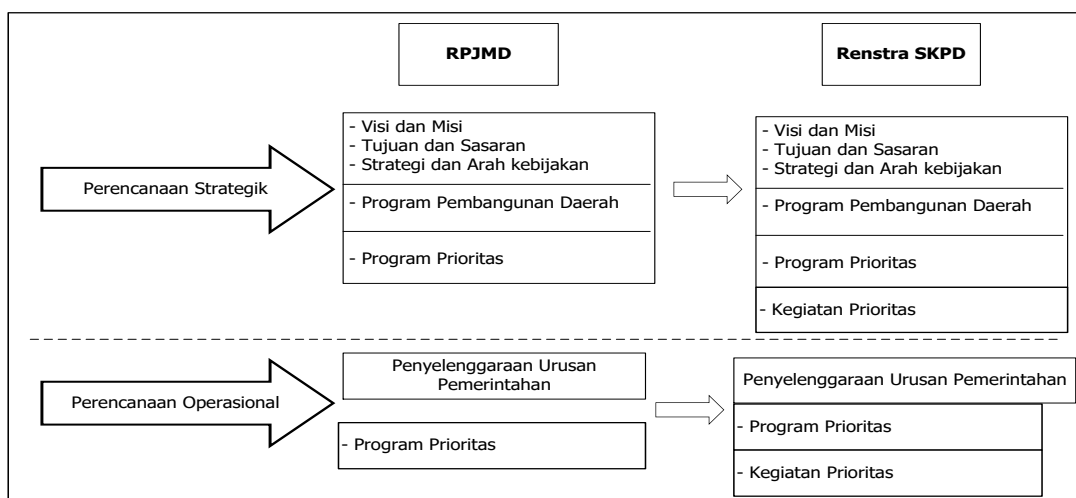
sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu dan sinergik antara satu dengan lainnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan, yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur.

Renstra Dinas Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagai urusan pemerintah dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Bupati Kutai Timur yaitu **“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”**

Gambar Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD



Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2(dua) perencanaan strategis dan operasional maka OPD

dalam perencanaan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (visi, misi tujuan dan sasaran OPD) dan permasalahan urusan pemerintah daerah (indikator kinerja daerah).

Renstra Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem perhubungan yang efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Kutai Timur, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran;
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

-
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 18. Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

-
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Pelaporan Kinerja Instransi Pemerintah;
 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025;
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035,
 25. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, .

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan sektor perhubungan, Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor Perhubungan, yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan, Kabupaten kutai timur Tahun 2021-2026 secara sistematika tersusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas struktur organisasi dan sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang perkembangan kinerja pembangunan sektor/bidang, capaian kinerja pelayanan SKPD, capaian kinerja keuangan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan pernyataan visi dan misi SKPD dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 5 (lima) kedepan 2021-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perhubungan

Bagian ini mengemukakan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

Bab VIII Penutup



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi

Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016, Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Perhubungan,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan,
3. Pembinaan dan pelaksanaan Perhubungan,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural Dinas Perhubungan,

1. Kepala Dinas

a. Uraian Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembangunan.

b. Fungsi

1. Penetapan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

2. Perencanaan, pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang perhubungan.
 3. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Perhubungan Darat.
 4. Pembinaan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas
 5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretaris
- a. Uraian Tugas Pokok
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan, yang meliputi perencanaan program, umum, dan keuangan.
 - b. Fungsi
 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 2. Pengolahan dan analisis informasi, data dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
 3. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dinas, dokumentasi dan perpustakaan;
 4. Pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 5. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
 6. Pengusulan program Perhubungan, dan Pelatihan apratur/kepegawaian
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan
- a. Uraian Tugas Pokok
Sub bagian Perencanaan program dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana

program dan Keuangan kegiatan tahunan, melaksanakan pengelolaan evaluasi dan pelaporan urusan keuangan , evaluasi dan pelaporan.

b. Fungsi

1. Pengelola dan pengkoordinasian penyusun rencana kerja anggaran atau (RKA) dan Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Keuangan.
2. Pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi sebagai bahan untuk penyusun program
3. Penyusun bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian Perencanaan program dan Keuangan.
4. Persiapan Administrasi Pertanggung Jawaban serta Laporan Keuangan serta Verifikasi keuangan secara berkala.

4. Kepala Sub Bagian Umum

a. Uraian Tugas Pokok

Sub bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola tata usaha, mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, dan tugas umum lainnya.

b. Fungsi

1. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan sub bagian umum;
2. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian dinas, termasuk pengelolaan data kepegawaian, bahan mutasi serta kenaikan pangkat;
3. Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan urusan kerumah tanggaan dinas;
4. Melaksanakan administrasi surat menyurat, tata laksana, dan naskah dinas;
5. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, ketata laksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengadaan masyarakat;
6. Mempersiapkan dan mengelola bahan melaksanakan tata naskah, kersipan, surat menyurat dan perpustakaan dinas;

7. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kehumasan, protokol, dan perjalanan dinas;
8. Mengusulkan dan memproses pegawai untuk mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional, kursus-kursus maupun ujian dinas pegawai;
9. Mempersiapkan bahan koordinasi penerimaan tamu, keprotokolan, dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan dinas Perhubungan ;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
11. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
12. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
13. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepala Bidang Perhubungan Darat

a. Uraian Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis lingkup bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dan Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan (ASDP); serta Angkutan Darat.

b. Fungsi

1. Penyusunan bahan perencanaan program kegiatan dalam bidang perhubungan darat;
2. Perumusan bahan kebijakan dalam bidang perhubungan darat;
3. perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang Perhubungan darat;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Angkuatan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Teknis Sarana dan Prasarana;

6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, Angkutan Darat.
6. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
 - a. Uraian Tugas Pokok
Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
 - b. Fungsi
 1. Pelaksanaan program kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
 2. Penyiapan Bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
 3. Penyiapan bahan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
 4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
7. Kepala Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP).
 1. Uraian Tugas Pokok
Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP).
 2. Fungsi
 1. Pelaksanaan program kegiatan Angkutan Sungai dan Penyeberangan
 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan Kegiatan Teknis ASDP.
 3. Penyiapan bahan kegiatan ASDP;
 4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi Kegiatan ASDP.
8. Kepala Seksi Angkutan Darat
 - a. Uraian Tugas Pokok
Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Angkutan Darat.
 - b. Fungsi
 1. Pelaksanaan program Angkutan Darat;

2. Penyiapan Bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Angkutan Darat;
 3. Penyiapan bahan kegiatan Angkutan Darat;
 4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Angkutan Darat.
9. Kepala Bidang Perhubungan Laut
- a. Uraian Tugas Pokok
Melaksanakan penyiapan pengurusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pembimbingan dan pengendalian teknis lingkup bidang Lalu Lintas Angkutan, Teknis Sarana dan Prasarana serta keselamatan penumpang.
 - b. Fungsi
 1. Penyusunan bahan perencanaan program kegiatan dalam bidang Perhubungan Laut;
 2. Perumusan bahan kebijakan dalam bidang Perhubungan Laut;
 3. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang Perhubungan Laut;
 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan;
 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Teknis, Sarana dan Prasarana. Perumusan dan Pembinaan Keselamatan Penumpang.
10. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut
- a. Uraian Tugas Pokok
Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan Lalu Lintas Angkutan.
 - b. Fungsi
 1. Pelaksanaan program kegiatan Lalu Lintas Angkutan;
 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Lalu Lintas Angkutan;
 3. Penyiapan bahan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Lalu Lintas Angkutan.

11. Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Laut

a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan Teknik Sarana dan Prasarana.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Teknik pemantauan Sarana dan Prasarana;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Teknik Sarana dan Prasarana;
3. Penyiapan bahan kegiatan, usulan Kegiatan Teknik Sarana dan Prasarana;
4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Teknik Sarana dan Prasarana.

12. Kepala Seksi Keselamatan Penumpang Laut

a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan Keselamatan Penumpang.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Teknik pemantauan Keselamatan Penumpang;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Keselamatan Penumpang;
3. Penyiapan bahan kegiatan, usulan Kegiatan Keselamatan Penumpang;
4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Keselamatan Penumpang.

13. Kepala Bidang Perhubungan Udara.

a. Uraian Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis lingkup bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara,

- b. Fungsi
 - 1. Penyusunan bahan perencanaan program kegiatan dalam bidang Perhubungan Teknik Bandara ;
 - 2. Perumusan bahan kebijakan dalam Angkutan Dan Keselamatan Penumpang Udara;
 - 3. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang Perhubungan Udara;
 - 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara;
 - 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Perhubungan Udara;
 - 6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Udara.

14. Kepala seksi Teknik Bandara

- a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan , dan pembinaan teknis kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.
- b. Fungsi
 - 1. Pelaksanaan program kegiatan Teknik Bandara
 - 2. Melaksanakan Penyusunan dan kebijakan teknis bidang
 - 3. Melaksanakan Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkungan seksi

15. Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang

- a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan Angkutan dan Keselamatan Penumpang.
- b. Fungsi
 - 1. Pelaksanaan program kegiatan Teknis Angkutan dan Keselamatan Penumpang;

2. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas;
3. Penyiapan bahan kegiatan, usulan Kegiatan Angkutan dan Keselamatan Penumpang Udara.

16. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara

a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Teknis pemantauan Sarana dan Prasarana;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Teknis Sarana dan Prasarana;
3. Penyiapan bahan kegiatan, usulan Kegiatan Teknis Sarana dan Prasarana;
4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Teknis Sarana dan Prasarana.

17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pengujian Kendaraan;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pelaksanaan Pengujian;
3. Penyiapan bahan kegiatan Cek Fisik Kendaraan Bermotor;
4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

18. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

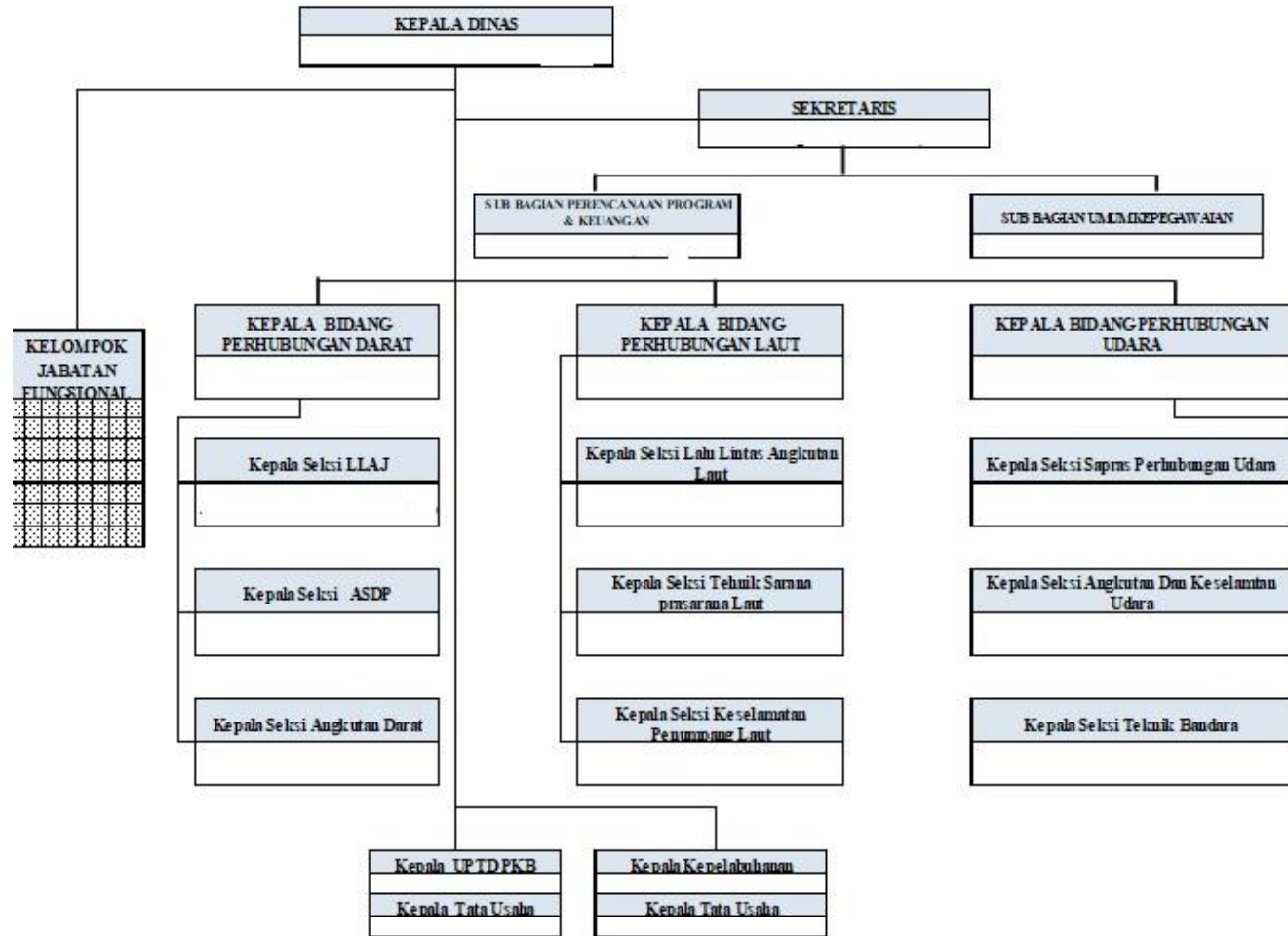
a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaporan UPT PKB;
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, perlengkapan UPT.PKB dan pengarsipan.
3. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi barang milik daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur
 Peraturan Bupati Kutai Timur Tanggal 24 Nopember 016
 No. 26 Tahun 2016



2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan,

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah PNS, TK2D di Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015 berjumlah 186 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 87 orang, Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 99 orang. Gambaran komposisi aparatur menurut kepangkatan, pendidikan dan jabatan eselon secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.1 – 2.4.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/ c	1 orang
2	Pembina TK. I	IV/ b	1 orang
3	Pembina	IV/ a	3 orang
4	Penata TK. I	III/ d	8 orang
5	Penata	III/ c	4 orang
6	Penata Muda TK. I	III/ b	8 orang
7	Penata Muda	III/ a	9 orang
8	Pengatur Muda TK. I	II/ d	10 orang
9	Pengatur	II/ c	17 orang
10	Pengatur Muda TK. I	II /b	3 orang
11	Pengatur Muda	II/ a	-
12	Juru TK. I	I/ d	-
	Jumlah		64 orang

Sumber : Data Kepegawaian Bulan Desember Tahun 2018

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana/ S2	11 orang
2	Sarjana/ S1	25 orang
3	Diploma III	6 orang
4	SLTA/ SMK/ Sederajat	26 orang
5	SLTP/ SMP	-
	Jumlah	68 orang

Sumber : Data Kepegawaian Bulan Desember Tahun 2018

Tabel 2.3
Jumlah TK2D berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana/ S1	24 orang
2	Diploma 3	7 orang
3	Diploma 1	1 orang
4	SLTA/ SMK/ Sederajat	50 orang
5	SLTP/ SMP	1 orang
	TOTAL	83 orang

Sumber : Data Kepegawaian Bulan Desember Tahun 2018

Tabel 2.4
Jumlah Esselon

No	Esselon	Jumlah
1	Esselon II	1 Orang
2	Esselon III	3 orang
3	Esselon IV	13 orang
	TOTAL	17 orang

Sumber : Data Kepegawaian Bulan Desember Tahun 2018

Tabel 2.5
Yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Penjenjangan

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	4 orang
2	PPNS	6 orang
3	Pengadaan Barang dan Jasa	21 orang
4	Transportasi	Orang
No	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Diklat PIM II	1 orang
2	Diklat PIM III	5 orang
3	Diklat PIM IV	11 orang

Sumber : Data Kepegawaian Bulan Desember Tahun 2018

2.2.2. Sarana prasarana

Sarana prasarana yang dikelola Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

a. Sarana :

Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Bermotor

No	Kendaraan	Tahun	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	2005 - 2018	20 Unit
2	Kendaraan Roda 2	2004 - 2015	28 Unit
3	Mobil Derek	2018	1 Unit
4	Speed Boat	2018	1 Unit
	TOTAL		50 Unit

Sumber : Data Inventarisasi Barang 2018

b. Prasarana :

Tabel 2.7

Jumlah Bangunan/Gedung Kantor

No	Bangunan/Gedung	Lokasi	Tahun Pembuatan	Kondisi
1	Kantor Dinas Perhubungan	Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi		Baik
2	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Jl. Sangatta-Bengalon		Baik
3	Terminal Type C (Terminal Regional Sangatta)	Kec. Sangatta Selatan		Pembangunan lanjutan
4	Sub Terminal - Sangatta Selatan - Bengalon - Rantau Pulung - Karangany - Wahau - Kongbeng - Sangkulirang - Muara Bengkal - Muara Ancalong - Long Mesangat - Kaliorang - Maloy	Desa Sangatta Selatan Desa Sepaso Barat Desa Kebon Agung Kec. Karangany Kec. Wahau Kec. Kongbeng Ronggang Kec. Muara Bengkal Muara Ancalong Long Mesangat Kaliorang Maloy		Rusak berat Baik Baik Baik Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik Rusak Berat Baik Rusak Berat Baik Rusak Berat Rusak Berat
6	Pelabuhan Kenyamukan Sangatta	Kec. Sangatta Utara		Baik
7	Pelabuhan Rakyat Benua Baru	Kec. Sangkulirang		Kurang Baik
8	Dermaga Tanjung Manis Dermaga Benua Baru Hulu Dermaga Ronggang I & II Dermaga Desa Saka	Kec. Sangkulirang		

Dermaga Desa Peridan			
Dermaga Gang Delima			
Ds. Benua Baru Ilir			
Dermaga Desa Kolek			
Dermaga Kayu Ulin Desa			
Krayaan/P. Rinding			
Dermaga Ferry			
Penyebrangan Tungkap			
RT.2 Desa Saka			
Dermaga Susuk Tengah	Kec. Sandaran		
Dermaga Susuk Luar			
Dermaga Labung pinang			
Ds. Tanjung Mangkaliat			
Dermaga Rimba Hijau			
Desa Manubar			
Dermaga Jaipdan	Kec.Ma. Wahau		
Dermaga Wehea			
Dermaga Desa Slabing			
Dermaga Desa Mulupan	Kec.Ma.Bengkal		
Dermaga Desa Benua			Rusak Berat
Baru dekat kantor Camat			
Ma. Bengkal			
Dermaga Ma. Ancalong	Kec.Ma.Ancalong		
Dermaga Long Pond	Kec. Telen		
RT.17 Muara Pantun			
Dermaga Desa Telaga	Kec.BatuAmpar		
Dermaga Batu Timbun			Rusak Berat
Dermaga Desa Kadungan	Kec. Kaubun		
Jaya			
Dermaga Kec. Karang	Kec. Karang		

	Dermaga Desa Miau	Kec. Kongbeng		
	Dermaga Desa Rantau Sentosa	Kec. Busang		
	Dermaga Kec. Long Masangat	Kec. Long Mesangat		
	Dermaga Kec. Kaliorang	Kec. Kaliorang		
	TOTAL			Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, .

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, .

Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, disajikan dalam table 2.8 sebagaimana berikut ini.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Tabel.2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Orang/Barang melalui Terminal/ Dermaga Per Tahun			80.853orang/590ton	92.980orang/49ton	97.629orang/714ton	102.10orang/786ton	107.636orang/863,9ton	132.746orang/2.207ton	92.980orang/640ton	97.629orang/714ton	102.510orang/786ton	107.636orang/863.9ton					
2	Jumlah Terminal		13			1		2	12		1	2	1					
3	Rasio Ijin Trayek		0,13	0,14	0,0004	0,00022	0,00022	0,00024	0,0456	0,00042	0,00022	0,0014	0,00014				0,64	
4	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum			383	6.616	7.276	7.936	8.596	5.983	6.616	7.276	6.295	3.529				79,32	
5	Angkutan Darat		0,79	0,87	21,62	22,27	22,71	23,17	6,42	21,62	22,27	6,17	9,20				27,19	
6	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)			30menit/unit	30menit/unit	30menit/unit	30menit/unit	30menit/unit	25menit/unit	25menit/unit	25menit/unit	25menit/unit	25menit/unit				83	
7	Pemasangan Rambu – Rambu			16,87	17,39	17,39	17,39	17,39	16,87	16,87	17,39	9,22	154,00				53,00	
8	Jumlah Pelabuhan Laut		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

9	Jumlah Pelabuhan Udara		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	Jumlah Penerbangan																	

Untuk capaian kinerja pada indikator rasio ijin trayek mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan tidak adanya penambahan ijin trayek baru pada tahun 2020 sehingga capaian dibawah target. Tentunya factor banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab, dengan kata lain semakin banyak pengguna kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan.

Untuk indikator jumlah uji KIR di tahun 2020 juga mengalami penurunan dari target 8.596 dengan realisasi capaian sebesar 3.529. Hal ini dikarenakan beberapa factor termasuk munculnya surat edaran Kementerian Perhubungan No. 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) sehingga unit kendaraan yang melebihi dimensi tidak bisa untuk dilakukan uji KIR.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Tabel.2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Pegawai		6.155.66 9.598	6.936.06 6.572	7.349.58 1.000	7.835.60 9.312		5.626.43 1.828	6.547.84 6.745	6.597.9 22.091	7.309.0 49.377		0,91	0,94	0,90	0,93		
Belanja Barang dan Jasa		4.507.47 0.560	7.563.78 4.750	9.334.12 1.950	3.448.50 1.644		3.942.40 4742	4.264.71 5.287	8.935.2 76.095	3.201.9 31.316		0,87	0,56	0,96	0,93		
Belanja Modal		10.000.3 81.535	14.3054 49450	15.456.8 90.419	8.677.42 4.649		1.929.81 8.525	10.632.7 11.703	11.714. 491.513	7.743.5 17.956		0,19	0,74	0,76	0,93		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perhubungan,

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang semakin meningkat, maka perlu adanya peningkatan pelayanan khususnya dibidang transportasi perhubungan, hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi bagi Dinas Perhubungan, maupun instansi terkait lainnya.

Tantangannya adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi karena peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi maka perlu pelayanan transportasi jarak dekat dan jauh yang baik dan nyaman;
- b. Memenuhi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, maka dibutuhkan pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Pemenuhan akan sarana dan prasarana lalu lintas yang mencukupi dan ideal;
- d. Memenuhi kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran yang aman dan tertib;
- e. Produk hukum pelaksanaan sistem transportasi di Kabupaten Kutai Timur.

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur dalam menangani masalah transportasi ini adalah :

- a. Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur akan menangani masalah transportasi secara terbuka dengan merencanakan angkutan masal seperti Bus kota/Bus pelajar, serta meningkatkan standrat keselamatan bagi angkutan umum;
- b. Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas disetiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
- c. Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur akan menambah prasarana lalu lintas di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

- d. Dinas Perhubungan, akan melaksanakan operasi penertiban parkir setiap waktu guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mengatur perparkiran di Kabupaten Kutai Timur.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur dimasa datang diharapkan akan ditopang dari sektor perdagangan barang dan jasa. Untuk itu perlu didukung infrastruktur, sistem transportasi dan jaringan sistem teknologi yang memadai. Selain itu diharapkan terjadi keterpaduan sistem tata ruang antara Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, sehingga menimbulkan dampak bagi pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah.

Secara umum permasalahan terkait transportasi di kabupaten kutai timur yang semakin berkembang pada saat ini antara lain :

- Minimnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi.
- Kondisi kendaraan angkutan umum yang ada kebanyakan kurang baik dan kurang nyaman.
- Masih dominannya penggunaan kendaraan pribadi dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.
- Belum terlayannya angkutan umum pada pengembangan kawasan.
- Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi disisi lain juga mempunyai pengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas.
- Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang perhubungan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, dibidang perhubungan belum optimal 2. Realisasai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan 	LAKIP/ LKj-IP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realiasi penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Terbatasnya SDM yang berkualifikasi teknis 	Pengaturan alokasi anggaran, diluar kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan prima dibidang perhubungan 2. Belum memadainya ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian transportasi 3. Belum memadainya

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

	belum optimal 3. Realisasi pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam dibidang perhubungan belum optimal				cakupan infrastruktur transportasi 4. Belum optimalnya pembinaan angkutan, keselamatan lalu lintas, dan regulasi.
Kajian terhadap Renstra Provinsi dan Kementerian	Pelayanan sistem antar moda terminal penumpang dan barang, pelabuhan laut, bandar udara dan dermaga	RENSTRA	1. Belum optimal terminal angkutan Type B di Kab. Kutai Timur	Belum tersedianya pedoman teknis	1. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan terminal 2. Belum tersedianya dokumen rancangan teknis terminal
Kajian terhadap RTRW	Realisasi pembangunan prasarana	RTRW Kabupaten Kutai Timur	Dokumen perencanaan transportasi belum	Pengaturan penganggaran pengadaan lahan,	1. Belum terwujudnya pranata

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

	perhubungan (terminal) menurut sistem kota belum terwujud		disusun sesuai tuntutan perencanaan makro kabupaten	diluar kewenangan	perencanaan dan persiapan pembangunan terminal sesuai arahan RTRW. 2. Masih kurang sinergitas perencanaan dengan SKPD yang berkompeten
--	---	--	---	-------------------	---

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

- a. Visi Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026 adalah :

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah :

1. Kutai Timur Sejahtera

Adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, Makmur, Sehat, Damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar.

2. Menata untuk Semua

Adalah kondisi Masyarakat Kutai Timur dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continoues improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

- b. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Bupati terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia Berbudaya dan Bersatu;***
2. ***Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian;***
3. ***Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata;***
4. ***Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi;***
5. ***Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;***

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Iman, takwa dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk merajut kehidupan bersama.

Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberadaan seni budaya. Budaya lokal merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif dari derasnya arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia.

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang sejahtera dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan juga program penurunan angka pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan program penurunan angka pengangguran. Program ini dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan

fungsi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kesehatan juga dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah Peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah, dan UMKM.

3. Mewujudkan pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat), tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah terutama pada keberlangsungan pergerakan barang dan jasa beserta akses antar wilayah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.

Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup. Optimalisasi potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik serta memperkecil dampak keterpurukan lingkungan dan juga memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/permukiman, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

4. Mewujudkan Pemerintah Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta

peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas

5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemantapan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan kebijakan tata ruang wilayah yang mantap akan mempengaruhi sektor pembangunan yang lain terutama pembangunan infrastuktur dan pengembangan perekonomian khususnya sektor pertanian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawsan penataan ruang.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <i>"Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua"</i>				
No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi III : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi ➤ Minimnya SDM bidang Perhubungan ➤ Masih kurangnya disiplin masyarakat berlalu lintas ➤ Pelayanan angkutan umum belum memenuhi harapan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi ➤ Kepemilikan angkutan umum masih bersifat pribadi ➤ Disiplin pengguna jalan masih rendah ➤ Tidak semua masyarakat mengerti Teknologi Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Political Will bidang transportasi ➤ Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Lalu Lintas ➤ Tersedianya anggaran ➤ Penyediaan angkutan masal dilakukan oleh Pemerintah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Periode 2015-2019

Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 merupakan segmen lima tahunan ketiga dari Renstra Jangka Panjang Perhubungan (RPPJP), sehingga diharapkan Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah terutama untuk meningkatkan daya saing sebagai upaya penurunan biaya logistik.

Gambaran umum Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan asesibilitas masyarakat terhadap layanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai;
3. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan perundang – undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Transportasi oleh Kementerian Perhubungan dalam Renstra periode 2015-2019, yaitu sebagai berikut :

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”.

2. Misi

- a. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
- b. Peningkatan Penyelenggaraan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
- c. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

3. Strategi

- a. Perencanaan Terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

- b. Pelibatan Pemda/BUMN/Swasta;
 - c. Kompetensi dan Profesionalisme SDM;
 - d. Mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kehandalan;
 - e. Pembangunan transportasi dengan skema Multy Year;
 - f. Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan.
4. Sasaran
- a. Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan;
 - b. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air;
 - c. Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Terwujudnya profesionalisme SDM transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
 - e. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
5. Kebijakan
- a. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi;
 - b. Terpenuhinya ketersediaan, kehandalan dan aksesibilitas infrastruktur transportasi yang efisien dan skema KPS yang produktif;
 - c. Perekonomian yang kuat dan maju dengan didukung dengan infrastruktur dan transportasi dan layanan yang handal;
 - d. Pemenuhan jaringan transportasi dengan perencanaan tata ruang nasional;
 - e. Pembangunan daerah tertinggal dan terbelakang dengan sistem jaringan transportasi untuk mendukung sektor pertanian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat bahwa penataan ruang Kabupaten Kutai Timur adalah mengembangkan ruang kota metropolitan yang mengarah pada kota perdagangan dan jasa. Guna mendukung perkembangan Kabupaten Kutai Timur sebagai kota metropolitan yang berbasis perdagangan dan jasa, tentunya perlu didukung

dengan sarana prasarana transportasi yang memadai dan tetap menjaga serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) bertujuan untuk melihat kembali RPJMD apakah telah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup berkelanjutan. Sedangkan hasil kajian atas kebijakan, rencana, program maupun kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tentunya ada yang perlu untuk mendapat perhatian lebih jauh terhadap pembangunan berkelanjutan yaitu Program Pengembangan Sistem Transportasi.

Dari hasil kajian, terdapat beberapa masukan atau usulan untuk melengkapi kebijakan, rencana, program maupun kegiatan dalam RPJMD yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan yaitu :

- Program Pengembangan Sistem Transportasi
 - Pengembangan Sistem Transportasi yang ramah, terpadu dan berkelanjutan.
 - Pengembangan angkutan feeder (trayek pendukung yang melayani trayek utama)
 - Pengembangan park n ride

Hal lain yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kabupaten yang berkaitan dengan penataan ruang di masa depan adalah menyangkut pemantauan pemanfaatan dan perkembangan ruang. Hal – hal yang perlu dikaji dalam hal ini adalah antara lain : keefektifan sistem penataan ruang secara menyeluruh, kemajuan dalam mencapai tujuan – tujuan pembangunan, hubungan antara proses – proses perencanaan dan inisiatif-inisiatif pemanfaatan ruang, kesesuaian dari berbagai rencana tata ruang kawasan – kawasan. Kewajiban pemerintah daerah kabupaten yang juga penting adalah menyebar luaskan informasi penataan ruang, yang antara lain meliputi kegiatan menyusun standar dan kaidah pengumpulan informasi, mengkomplilasi dan memelihara serta meng-update informasi tentang ruang, membentuk metode evaluasi teknis untuk permohonan persetujuan rencana, melakukan kajian berkaitan dengan penataan ruang dan memberikan informasi tersebut secara mudah kepada masyarakat.

Melalui pranata – pranata yang telah dijelaskan di atas, dibentuklah suatu pembagian perwilayahan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran makro pengembangan sub satuan wilayah pengembangan (SSWP) di Kabupaten Kutai Timur yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan pusat – pusat kegiatan baik perkotaan maupun perdesaan. Sistem perwilayahan ini pun menggambarkan satuan wilayah kabupaten yang memiliki pusat di suatu kota kecamatan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perwilayahan tersebut. SSWP di Kabupaten Timur adalah sebagai berikut.

Sistem Prasarana Utama Wilayah

Sistem Transportasi Darat

Tujuan pengembangan prasarana dan sarana transportasi pada dasarnya diarahkan untuk mendukung peningkatan dan perkembangan secara optimal, khususnya untuk membuka keterisolasian wilayah serta menunjang pengembangan interaksi wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Selain itu diarahkan pula untuk meningkatkan kelancaran koleksi dan distribusi barang dan jasa serta mobilitas masyarakat di kawasan Kabupaten Kutai Timur.

Jaringan Jalan

Rencana Pengembangan Jaringan jalan di Kabupaten Kutai Timur terdiri atas :

1. jaringan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangatta – KUPI Maloy
2. Jaringan jalan Arteri primer nasional, terdiri atas :
 - a. peningkatan ruas jalan Bontang - Sangatta;
 - b. peningkatan ruas jalan Sangatta – Sp. Perdau;
 - c. peningkatan ruas jalan Yos Sudarso (Sangatta);
 - d. peningkatan ruas jalan Sp. Perdau – Muara Lembak;
 - e. peningkatan ruas jalan Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang);
 - f. peningkatan ruas jalan Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan Maloy;
3. Jaringan jalan kolektor primer I provinsi, terdiri atas :
 - a. peningkatan ruas jalan Sp. Perdau – Batu Ampar;
 - b. peningkatan ruas jalan Batu Ampar – Sp. 3 Muara Wahau;

- c. peningkatan ruas jalan Sp. 3 Muara Wahau - Kelay (KM. 100 – Muara Wahau/PDC); dan
 - d. peningkatan ruas jalan Muara Wahau – Kelay.
4. Jaringan jalan kolektor primer II provinsi, terdiri atas :
- a. peningkatan ruas jalan Sebulu – Muara Bengkal;
 - b. peningkatan ruas jalan Muara Bengkal – Sp. Batu Ampar;
 - c. peningkatan ruas jalan Sangkulirang – Talisayan;
 - d. pembangunan ruas jalan Muara Bengkal – Samarinda;
5. Jaringan jalan kolektor primer III kabupaten, terdiri atas :
- a. peningkatan ruas jalan Sp. Batu Ampar – Rantau Pulung – Sangatta;
 - b. peningkatan ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Sangkulirang;
 - c. pembangunan ruas jalan Pelawan – Karang;
 - d. peningkatan ruas jalan Pelawan – Sandaran;
 - e. peningkatan peningkatan ruas jalan Tabangan Lebak – Bengalon – Karang;
 - f. peningkatan ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Maloy;
 - g. peningkatan ruas jalan Muara Bengkal – Busang;
 - h. peningkatan ruas jalan Bengalon – Kawasan Industri (Dusun Muaramaan); dan
 - i. peningkatan ruas jalan Sp. 3 Jalan HTI Muara Bengkal – Muara Ancalong.
6. Jaringan jalan lokal kabupaten, meliputi peningkatan dan pembangunan seluruh ruas jalan yang menghubungkan antar desa dan peningkatan ruas jalan di dalam kawasan perkotaan ibukota kecamatan.
7. Jaringan jalan lokal/khusus, terdiri atas :
- a. peningkatan ruas jalan lokal/khusus untuk pertambangan di sekitar rencana rel kereta api selebar 100 meter;
 - b. peningkatan ruas jalan lokal/khusus untuk pertambangan berupa jalan tanah selebar 200 meter.
 - c. Peningkatan ruas jalan lokal/khusus untuk pertambangan dan perkebunan.

Jaringan Prasarana Lalu Lintas

Rencana jaringan prasarana lalu lintas di Kabupaten Kutai Timur terdiri atas :

1. Terminal tipe B di Sangatta Kecamatan Sangatta Utara ;
2. Terminal tipe C di Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Muara Wahau.

Jaringan Layanan Lalu Lintas

Rencana jaringan layanan lalu lintas di Kabupaten Kutai Timur meliputi trayek angkutan penumpang, terdiri atas :

1. Sangatta – Sangkulirang;
2. Sangatta – Samarinda;
3. Sangatta – Bengalon;
4. Sangatta – Muara Wahau;
5. Sangkulirang – Kaliorang – Maloy;
6. Sangkulirang – Muara Wahau;
7. Muara Wahau – Batu Ampar;
8. Muara Wahau – Muara Bengkal;
9. Muara Bengkal – Muara Ancalong; dan
10. Muara Bengkal – Batu Ampar – Rantau Pulung – Sangatta.

Jaringan Angkutan Sungai dan Penyebrangan

Di dalam system transportasi darat, terdapat pula jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Kabupaten Kutai Timur memiliki 1 (satu) pelabuhan angkutan sungai, sedangkan untuk angkutan danau dan penyeberangan tidak ada. Rencana sistem jaringan sungai di Kabupaten Kutai Timur terdiri atas :

1. pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau; dan
2. alur pelayaran sungai, yaitu Muara Wahau – Muara Kaman (Kabupaten Kutai Kartanegara).

Jalur Rel Kereta Api

Rencana jaringan jalur kereta api didasari arahan pengembangan jaringan jalur kereta api yang tercantum pada RTRWP Kalimantan Timur. Rencana pengembangan jaringan kereta api yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur diarahkan sebagai angkutan batubara, meliputi:

1. Pembangunan jaringan kereta api pada tahap menengah ketiga yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan–Kuaro–Long Kali–Penajam–Balikpapan–Samarinda–Bontang– **Sanggatta** – **Muara Wahau**–Muara Lesan–Tanjung Redeb –Tanjung Batu–Tanah Kuning–Tanjung Selo–Kerang Agung–Sesayap–Tidung Pale – Malinau – Mensalong Pembeliangan – Salang - Simanggaris – Batas Negara.
2. Pembangunan rel kereta api **Trans Kutai Kencana** yang menghubungkan Muara Wahau dan Bengalon dengan panjang sebesar 128,86 km digunakan untuk keperluan pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan.
3. Pembangunan Stasiun kereta api sedang di Kota Sangatta.

Sistem Transportasi Laut

Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Kutai Timur terdiri atas :

1. Pelabuhan Internasional, yaitu Pelabuhan Maloy di Kecamatan Kaliorang.
2. Pelabuhan Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara, Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, Pelabuhan di Kecamatan Sandaran dan;
3. Pelabuhan/terminal khusus, yaitu pelabuhan khusus yang merupakan pelabuhan khusus batubara, pelabuhan khusus Pertamina dan pelabuhan khusus CPO.

Pelabuhan Maloy diarahkan sebagai pelabuhan barang dengan lingkup pelayanan internasional dan regional. Pelabuhan Maloy merupakan pintu gerbang distribusi dan koleksi seluruh hasil industri dan pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Kutai Timur. Pelabuhan Kenyamukan direncanakan untuk dapat melayani angkutan penumpang umum yang

melayani rute – rute nasional dan terintegrasi dengan alur pelayaran nasional yang dikelola oleh PT. PELNI.

Alur pelayaran di Maloy termasuk di Selat Makassar (ALKI 2) yang merupakan jalur pelayaran nasional, regional dan internasional. Lokasi ini membuat Maloy memiliki potensi strategis untuk memasok ekspor ke negara – negara di Pacific Rim, terutama ke pasar CPO utama seperti China. Di Kabupaten Kutai Timur sendiri alur pelayaran barang dan penumpang yang terdiri atas :

1. Sangatta – Barru – Majene (Sulawesi Selatan) PP;
2. Sangatta – Tanjung Redeb PP;
3. Sangatta – Pare-pare (Sulawesi Selatan) PP;
4. Sangatta – Samarinda – Balikpapan PP; dan
5. Sangatta – Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan) PP.

Sistem Transportasi Udara

Bandar udara yang selama ini ada di Kabupaten Kutai Timur merupakan Bandar udara yang bersifat perintis ataupun Bandar udara yang dimiliki khusus oleh perusahaan perkebunan atau pertambangan. Bandar udara yang secara regular melayani penumpang saat ini adalah Bandar udara Tanjung Bara di Kecamatan Sangatta Utara, namun Bandar udara ini merupakan Bandar udara khusus yang dimiliki oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Arahkan ke depan, mengingat kebutuhan aksesibilitas masyarakat, keterjangkauan lokasi, dan potensi pengembangan perekonomian daerah, pengembangan Bandar udara mutlak diperlukan. Beberapa Bandar udara yang bersifat perintis akan ditingkatkan pelayanannya menjadi Bandar udara sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan tatanan kebandarudaraan nasional. Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Kutai Timur berupa bandar udara sekunder, yaitu bandar udara Sangkima di Kecamatan Sangatta Selatan serta Bandar udara Maloy di Kecamatan Kaliorang dan Bandar udara tersier yaitu bandara Miau di Kecamatan Kongbeng.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur, bisa disimpulkan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan secara berjenjang untuk mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi;
- b. Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda;
- c. Konsistensi antara rencana yang telah disusun dengan pelaksanaan dan pencapaian hasil yang berdaya guna bagi masyarakat.
- d. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi;
- e. Fasilitas pendukung transportasi (pelabuhan, terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
- f. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan, disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan dan Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah **Indikator** : Jumlah Penumpang yang terlayani (orang) dan Jumlah barang (ton), serta Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Terpenuhi SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perhubungan;
2. Terpenuhi sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatnya jumlah penumpang dan barang yang terlayani serta menurunnya angka kecelakaan berat;
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah ;

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3				4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan dan Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani dan menurunnya angka kecelakaan berat	Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR	Jumlah Uji Kir Kendaraan Wajib Uji	Unit	8.596	3.529	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis									
		- Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	3	1	-	-	-	-	-
		- Pelabuhan Udara	Jumlah Pelabuhan Udara	Unit	1	-	-	-	-	-	-
		- Terminal Bis	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	-	1	1	1	-	-
		Persentase Layanan Angkutan Darat	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100\%$	%	23,17	23,63	9,38	9,57	9,76	9,96	10,16
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yg tdk memiliki KIR pd th n}}{\text{Jumlah Angkutan Umum pada tahun n}} \times 100\%$	%	26,17	26,71	56,91	58,05	59,21	60,39	61,60
Persentase Pemasangan Rambu-rambu	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Rambu – Rambu pd th n}}{\text{Jumlah Rambu – rambu yg seharusnya tersedia}} \times 100\%$	%	17,39	20	20	20	20	20	20		

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

		<i>Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun</i>										
		- Jumlah ORANG melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Org	107.636	113.018	69.070	70.451	71.860	73.297	74.763	
		- Jumlah BARANG melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah arus barang angkutan umum	Ton	863,9	950,21	88,04	89,80	91,60	93,43	95,30	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Pembangunan bangsa diarahkan untuk mewujudkan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dengan generasi mendatang yang lebih baik. Strategi pembangunan prioritas Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di bidang transportasi darat, laut dan udara. Strategi-strategi pembangunan Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Timur, diarahkan pada lima sasaran pokok yaitu : Terpenuhinya SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perhubungan, Meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi, Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi, Terlaksananya pelayanan transportasi yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah, Meningkatkan pengelolaan sumber data elektronik bidang perhubungan yang bertujuan membuka akses informasi keseluruhan masyarakat. Kebutuhan dasar selama ini sudah diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan diagendakan dalam agenda lima tahunan yang secara tegas dan jelas menjadi agenda utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026.

Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat, ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan, serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat. Pada lima tahun mendatang ini, pengakuan pemberian pelayanan pemenuhan kebutuhan hak dasar semakin dioptimalkan.

Pembangunan tidak semata-mata menekankan pada pencapaian dan pengejaran infrastruktur sarana prasarana.

Agar dapat mewujudkan kerangka pembangunan tersebut dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka ditetapkan beberapa strategi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan angkutan transportasi darat, laut dan sungai dengan menjamin keterpaduan antar moda.
2. Pengembangan moda transportasi orang dan barang;
3. Pengembangan teknologi informasi dan data elektronik;

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam merekat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari aspek kepentingan publik, sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara mengemban fungsi pelayanan publik dalam skala domestik maupun internasional. Pengembangan transportasi harus didasarkan pada pengembangan yang berkelanjutan (*sustainability*), yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan. Perencanaan jangka pendek harus didasarkan pada pandangan jangka panjang, sehingga tidak terjadi perencanaan “bongkar-pasang”.

5.2. Arah Kebijakan

Salah satu kunci keberhasilan program pembangunan daerah adalah terciptanya pelayanan umum yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggungjawab, efektif dan efisien. Dalam lima tahun mendatang arah kebijakan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada :

- Peningkatan pengelolaan angkutan dengan keterpaduan antar moda transportasi darat;
- Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan;
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan data elektronik;

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua				
Misi III: Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan dan Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	Terpenuhinya SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Perhubungan	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang Perhubungan	Pemenuhan SDM Perhubungan yang berkualitas	
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Peningkatan Fasilitas dan Kelengkapan Transportasi	Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan	
	Meningkatnya Jumlah Penumpang dan Barang yang terlayani dan menurunnya angka kecelakaan berat.		Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Prasarana Perhubungan	Membangun/Mengembangkan Terminal type C dan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan melalui mekanisme Multiyears
			Peningkatan pengendalian keselamatan dan pembinaan pelayanan angkutan jalan	Meningkatkan pengawasan dan penindakan di lapangan terhadap ODOL, serta Uji KIR terhadap kelayakan kondisi sarana angkutan

	<p>Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah</p>	<p>Merencanakan titik-titik pengembangan simpul layanan transportasi</p>	<p>Meningkatkan Sarana Prasarana Transportasi dan data elektronik</p>



BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut :

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

**Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra SKPD			
							Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah Yang Baik	Mengelola Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Capain Kinerja		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota																		
			2.15.01.20.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renstra				2dok	200.000.000	2dok	200.000.000	2dok	200.000.000	2dok	200.000.000	2dok	200.000.000				
			2.15.01.20.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJ-IP				1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000				
			2.15.01.20.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi				1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000				
			2.15.01.20.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji				12bln	9.239.720.654	12bln	9.239.720.654	12bln	9.239.720.654	12bln	9.239.720.654	12bln	9.239.720.654				
			2.15.01.20.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Bulan Gaji PTT				12bln	1.600.121.772	12bln	1.600.121.772	12bln	1.600.121.772	12bln	1.600.121.772	12bln	1.600.121.772				
			2.1501.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Honor				12bln	300.000.000	12bln	300.000.000	12bln	300.000.000	12bln	300.000.000	12bln	300.000.000				
			2.15.01.20.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Akhir Keuangan				1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000				
			2.15.01.20.2.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000	1dok	100.000.000				
			2.15.01.20.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				145 stell	50.000.000	145 stell	50.000.000	145 stell	50.000.000	145 stell	50.000.000	145 stell	50.000.000				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta pelatihan				10orang	200.000.000	10orang	200.000.000	10orang	200.000.000	10orang	200.000.000	10orang	200.000.000				
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi				10kali	500.000.000	10kali	500.000.000	10kali	500.000.000	10kali	500.000.000	10kali	500.000.000				
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta				5orang	100.000.000	5orang	100.000.000	5orang	100.000.000	5orang	100.000.000	5orang	100.000.000				
			2.15.01.20.6.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi				1 instalasi	50.000.000			1 instalasi	50.000.000			1 instalasi	50.000.000				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen Perencanaan			3dokumen	1.000.000.000										
			Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal			1unit	500.000.000	1unit	500.000.000	1unit	500.000.000						
			Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	Jumlah Terminal			6terminal	500.000.000	6terminal	500.000.000	6terminal	500.000.000	6terminal	500.000.000	6terminal	500.000.000		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal			6terminal	1.000.000.000	6terminal	1.000.000.000	6terminal	1.000.000.000	6terminal	1.000.000.000	6terminal	1.000.000.000		
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM			5orang	100.000.000	5orang	100.000.000	5orang	100.000.000	5orang	100.000.000	5orang	100.000.000		
	Mengendalikan Kelangkaan Jalan Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang Memenuhi Persyaratan Layak Jalan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana			1unit	300.000.000	1unit	300.000.000	1unit	300.000.000	1unit	300.000.000	1unit	300.000.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peserta			8orang	100.000.000	8orang	100.000.000	8orang	100.000.000	8orang	100.000.000	8orang	100.000.000		
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Registrasi	9.635		5000	150.000.000	5000	150.000.000	5000	150.000.000	5000	150.000.000	5000	150.000.000		
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus			1500 BLUe	200.000.000	1500 BLUe	200.000.000	1500 BLUe	200.000.000	1500 BLUe	200.000.000	1500 BLUe	200.000.000		
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi			2kali	75.000.000	2kali	75.000.000	2kali	75.000.000	2kali	75.000.000	2kali	75.000.000		
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Survey			4kali	100.000.000	4kali	100.000.000	4kali	100.000.000	4kali	100.000.000	4kali	100.000.000		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji dan Akreditasi			10Alat	300.000.000	10Alat	300.000.000	10Alat	300.000.000	10Alat	300.000.000	10Alat	300.000.000		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi			3kali	200.000.000	3kali	200.000.000	3kali	200.000.000	3kali	200.000.000	3kali	200.000.000		
			Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				15kali	200.000.000	15kali	200.000.000	15kali	200.000.000	15kali	200.000.000	15kali	200.000.000		
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian			5kali	200.000.000	5kali	200.000.000	5kali	200.000.000	5kali	200.000.000	5kali	200.000.000		
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Pertemuan			16kali	150.000.000	16kali	150.000.000	16kali	150.000.000	16kali	150.000.000	16kali	150.000.000		
			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah SDM			4orang	100.000.000	4orang	100.000.000	4orang	100.000.000	4orang	100.000.000	4orang	100.000.000		
			Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan			5kali	200.000.000	5kali	200.000.000	5kali	200.000.000	5kali	200.000.000	5kali	200.000.000		
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Inspeksi Audit			10kali	500.000.000	10kali	500.000.000	10kali	500.000.000	10kali	500.000.000	10kali	500.000.000		

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

				Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau															
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen			1dok	100.000.000										
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Movev					5kali	100.000.000								
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Studi Pengelolaan Pelabuhan			1dokumen	300.000.000										
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan			1unit	30.000.000.000										
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Pelabuhan			1unit	35.000.000.000	1unit	35.000.000.000	1unit	35.000.000.000	1unit	35.000.000.000	1unit	35.000.000.000		
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal															
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kecamatan			6kecamatan	300.000.000	6kecamatan	300.000.000	6kecamatan	300.000.000	6kecamatan	300.000.000	6kecamatan	300.000.000		
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga			3unit	600.000.000	3unit	600.000.000	3unit	600.000.000	3unit	600.000.000	3unit	600.000.000		
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga			3unit	600.000.000	3unit	600.000.000	3unit	600.000.000	3unit	600.000.000	3unit	600.000.000		
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengawasan			10kali	200.000.000	10kali	200.000.000	10kali	200.000.000	10kali	200.000.000	10kali	200.000.000		
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin TUKS			5TUKS	200.000.000	5TUKS	200.000.000	5TUKS	200.000.000	5TUKS	200.000.000	5TUKS	200.000.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Loka	Jumlah Koordinasi			12kali	200.000.000	12kali	200.000.000	12kali	200.000.000	12kali	200.000.000	12kali	200.000.000		
Managemen Transportasi Udara Yang Berkualitas	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Udara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandara		Program Pengelolaan Penerbangan															
				Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen														
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara*	Jumlah Sarana dan Prasarana														

Sangatta, September 2021

Kepala Dinas,

RIZALI HADI, S.IP
NIP. 19690117 199003 1 005

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF



BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini disajikan indikator kinerja Dinas Perhubungan, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan ditampilkan dalam table 7.1 :

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS
PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang ada}} \times 100\%$	50	60	70	80	90	100	100
		2. Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan}} \times 100\%$	100	12,72	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82
2.	Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani dan menurunnya angka kecelakaan	3. Rasio Konektivitas Kabupaten	$(IK1 \times \text{Bobot Angkuta Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot ASPD})$	100	62,50	52,14				
		4. Rasio di Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Volume Kendaraan}}{\text{Kapasitas Jalan}}$	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15
		5. Persentase Kendaraan Wajib Uji	$\frac{\text{Jumlah Kendaraan yang di Uji Pertahun}}{\text{Jumlah Kendaraan Wajib Uji}}$	17,15	21,51	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS
PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3				4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan dan Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani dan menurunnya angka kecelakaan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR	Jumlah Uji Kir Kendaraan Wajib Uji	Unit	8.596	3.529	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
		Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis									
		- Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	3	1	-	-	-	-	-
		- Pelabuhan Udara	Jumlah Pelabuhan Udara	Unit	1	-	-	-	-	-	-
		- Terminal Bis	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	-	1	1	1	-	-
		Persentase Layanan Angkutan Darat	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100\%$	%	23,17	23,63	9,38	9,57	9,76	9,96	10,16
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yg tdk memiliki KIR pd th n}}{\text{Jumlah Angkutan Umum pada tahun n}} \times 100\%$	%	26,17	26,71	56,91	58,05	59,21	60,39	61,60
Persentase Pemasangan Rambu-rambu	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Rambu – Rambu pd th n}}{\text{Jumlah Rambu – rambu yg seharusnya tersedia}} \times 100\%$	%	17,39	20	20	20	20	20	20		

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS
PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

		<i>Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun</i>										
		- Jumlah ORANG melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Org	107.636	113.018	69.070	70.451	71.860	73.297	74.763	
		- Jumlah BARANG melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah arus barang angkutan umum	Ton	863.9	950,21	88,04	89,80	91,60	93,43	95,30	

1. Rasio Ijin Trayek
2. Jumlah Uji KIR angkutan umum
3. Jumlah Terminal, Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara
4. Persentase Pemasangan Rambu-rambu
5. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur 2021 – 2026 merupakan Komitmen Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan perencanaan 5 (lima) tahun kedepan yang nantinya akan dipakai sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan pada tahun– tahun berikutnya.

Hal – hal yang berkembang dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur dan instansi terkait lainnya.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026 hendaknya dijalankan dengan penuh dengan tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi guna mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.